

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Dinas Pendidikan Godok Konsep Penyetaraan Sekolah

Mayoritas sekolah swasta diprediksi mau menerima bantuan dan program pemerintah.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Dinas Pendidikan DKI menuntaskan kajian dan persiapan penyetaraan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta Ibu Kota. Menurut dia, masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang memaksa siswa belajar di rumah, menjadi kesempatan bagi DKI untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta, dari manajerial kepala sekolah hingga pembenahan sistem pengajaran.

"Namanya itu Dinas Pendidikan, bukan Dinas Sekolah Negeri. Jadi, yang ditangani pendidikannya, baik di sekolah negeri maupun swasta," kata Anies dalam rapat pimpinan di Balai Kota, akhir pekan lalu.

Wacana penyetaraan kualitas sekolah berawal dari polemik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Saat itu, Dinas Pendidikan mencatat 358.664 anak mendaftar ke sekolah negeri. Namun, yang lolos hanya 232.653 anak. Daya tampung se-

kolah menengah pertama (SMP) negeri hanya bisa mengakomodasi 51,68 persen lulusan sekolah dasar (SD). Lebih rendah lagi, daya tampung sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA dan SMK) negeri hanya bisa menerima 35,41 persen dari total lulusan SMP.

Menurut Anies, orang tua enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan dua alasan, yaitu kualitas pendidikan yang lebih rendah dan uang bayaran yang mahal. Soal kualitas pendidikan, kata dia, Dinas Pendidikan diminta berkomunikasi dengan sejumlah sekolah yang minim sarana dan prasarana untuk melakukan merger dengan sekolah negeri terdekat. Secara bertahap, Pemprov juga akan menggelar pelatihan bagi kepala sekolah dan para tenaga pengajar.

Sedangkan untuk biaya, anak-anak pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah swasta mendapat tambahan dana subsidi Rp 130-240 ribu setiap bulan. DKI juga mengajukan anggaran untuk pembiayaan uang

"Kami akan komunikasikan dengan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta). Data berapa uang SPP dan uang pangkal di masing-masing sekolah swasta."

pangkal masuk sekolah swasta bagi 85.508 anak dari total 126.011 peserta yang gagal dalam PPDB 2020. Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial pandemi Covid-19.

Harapannya, kata dia, DKI bisa mendorong seluruh sekolah swasta penerima subsidi untuk mengikuti segala program pemerintah, termasuk penerimaan siswa baru. Dia meminta Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Catur Laswanto, dan Kepala Dinas Pendidikan, Nahdiana, menyiapkan kemungkinan pelaksanaan PPDB sekolah negeri dan swasta dilaksanakan serentak pada tahun ajaran 2021/2022 serta mengkaji struktur biaya di sekolah privat. "Sehingga bisa dibuatkan perda (peraturan daerah)," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 itu.

Nahdiana mengatakan pembiayaan di sekolah swasta sangat beragam, bergantung pada karakteristik dan nama setiap

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Dinas Pendidikan Godok Konsep Penyetaraan Sekolah

sekolah. Dia menyebutkan beberapa sekolah swasta kelas atas bisa mematok uang pangkal atau masuk sekolah lebih dari Rp 4 juta. Demikian pula dengan iuran bulanan pada tingkat SMA yang bisa mencapai Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Padahal subsidi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari KJP tingkat SMA hanya Rp 710 ribu per bulan. "Kami akan komunikasikan dengan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta). Data berapa uang SPP dan uang pangkal di masing-masing sekolah swasta," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, total sekolah di DKI Jakarta mencapai 4.598 unit, yang terdiri atas 1.945 sekolah negeri dan 2.653 sekolah swasta. Menurut Ketua Umum BMPS, Imam Parikesit, sekolah swasta terbagi menjadi lima golongan, yaitu kelas atas,

menengah-atas, menengah-tengah, menengah-bawah, dan kelas bawah. Meski tak detail, kata dia, mayoritas sekolah swasta DKI Jakarta berada di tingkat menengah dan bawah.

Imam menyatakan sekolah swasta menyambut positif rencana pemerintah memberikan subsidi dengan mengambil alih pembayaran uang pangkal dan iuran bulanan siswa. Menurut dia, selama ini sekolah kerap mengalami kesulitan dan ketidakpastian pembayaran biaya sekolah saat siswa mengalami masalah ekonomi. Padahal, kata dia, SPP sangat penting bagi sekolah untuk menutupi biaya gaji guru dan operasional bulanan. "Kalau uang pangkal itu biaya investasi bagi sekolah swasta. Jadi, tak masalah pembayarannya dicicil atau ditunda, asal terbayarkan," ujarnya. ●

Agar Bisa Bersekolah Privat

PEMERITAH Provinsi DKI Jakarta tengah mencari cara untuk menyalurkan dana bantuan kepada anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Sebagai tahap awal, DKI memiliki dua skema untuk mengambil alih tanggung jawab pembayaran uang pangkal anak-anak yang harus masuk sekolah swasta tersebut.

Hasil PPDB 2020

	SD	SMP	SMA/SMK	TOTAL
Pendaftar	111.800	125.089	121.775	358.664
Lolos	93.941	84.222	54.490	232.653
Tak lolos	17.859	40.867	67.285	126.011
Masuk data bansos Covid-19	9.959	27.766	47.783	85.508
Tak masuk data bansos Covid-19	7.900	13.101	19.502	40.503

Skema Dana Bansos Covid-19: Rp 171,06 miliar

	SD	SMP	SMA/SMK
Jumlah anak	9.959	27.766	47.783
Uang pangkal (Rp)	1 juta	1,5 juta	2,5 juta
Jumlah anggaran (Rp)	9,95 miliar	41,65 miliar	119,46 miliar

Skema Seluruh Peserta Gagal PPDB 2020:

Rp 247,37 miliar

	SD	SMP	SMA/SMK
Jumlah anak	17.859	40.868	67.285
Uang pangkal (Rp)	1 juta	1,5 juta	2,5 juta
Jumlah anggaran (Rp)	17,86 miliar	61,3 miliar	168,21 miliar

● FRANCISCO ROSARIANS